



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaan pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil pengendalian dan evaluasi untuk mencapai target kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dapat dicapai Tahun 2023.

Akhirnya kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Biro Administrasi Pembangunan diharapkan dapat mempedomani Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini sebagai arahan operasional dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Padang, Oktober 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP. 19691113 199303 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	6
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	6
2.2.Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
3.1.Tujuan dan Sasaran.....	14
3.2.Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	16
3.3.Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023	28
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	35
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perencanaan. Dalam sistem pembangunan holistik, perencanaan merupakan bagian terpenting dalam penentuan arah, bentuk, pembiayaan, kebijakan serta prioritas pembangunan. Sebagai satu kesatuan, perencanaan dan pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif, akuntabel, transparan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsepsi ekonomis, efisien dan efektif. Keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan baik berdasarkan keruangan maupun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan perencanaan yang didasarkan ruang adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat Nagari/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Pusat. Sementara itu berdasarkan waktu pelaksanaannya dikenal dengan Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM/Renstra OPD) dan Jangka Pendek (RKPD/Renja OPD). Dalam proses perencanaan selanjutnya, RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD digunakan oleh pemerintah/daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Privinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/328/V/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

15. Surat Edaran Gubernur Nomor 050/328/V/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.
16. Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/KPTS/BAP/XII-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahun 2023 pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

“ Melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan “

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan (penambahan/pengurangan) serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dgn Triwulan II Tahun 2023 dan capaian renstra perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Rancangan Program dan kegiatan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, selain itu Renja dibuat karena terjadi perubahan nomenklatur sehingga menyesuaikan dengan struktur baru.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (kondisi sampai 30 Juni 2023) adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Nama OPD : Biro Administrasi Pembangunan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1,188,267,851	22.09	275,581,639	22,09	22.09
4 01 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	88,000,000	45.83	18,280,000	45.83	20.77
4 01 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 dokumen	50,000,000	1 dokumen	11,520,000	50%	23.04
4 01 01 01 06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Perubahan RKA	4 dokumen	23,000,000	2 dokumen	3,140,000	50%	13.65

4	01	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20,000,000	0%	0	0%	0
4	01	01	1	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	2 kali	20,000,000	0	0	0	0
4	01	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	683,117,715	52%	161,048,127	45%	21.69
4	01	01	1	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	54,591,800	0 unit	0	0%	0.00
4	01	01	1	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	48,984,500	3 jenis	48,984,500	100%	100.00
4	01	01	1	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	20,000,000	5 jenis	17,352,000	100%	86.76
4	01	01	1	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	27 jenis	4,944,000	0 jenis	0	0%	0
4	01	01	1	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 dokumen	614,133,215	10 dokumen	94,711,627	25%	15.42
4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	147,860,136	23.33%	39,169,512	43.29%	26.49
4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	400 surat	5,008,000	400 surat	4,000,000	79.87%	79.87
4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayar dan jumlah rekening telp yang dibayarkan	10 mbps 1 rekening	7,698,000	0	0	0%	0.00

4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orang	135,154,136	5 orang	35,169,512	50%	26.02
4	01	01	1	09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138,370,000	29.44%	25,806,000	29.44%	18.65
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 unit	41,190,000	1 unit	12,311,000	29%	29.89
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara	3 unit	75,600,000	1 unit	7,655,000	33.33%	10.13
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	21,580,000	8 unit	5,840,000	26.66%	27.06
4	01	08				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD, APBN dan Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Fisik : 92 Keu : 92	1,239,394,000	Fisik : 44,24 Keu : 24,37	440,341,779	Fisik : 48,61 Keu : 26,78	35.53

4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92 %	722,694,250	185,406,049	50%	25.65
4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov Sumbar	92%	239,804,500	42,152,000	90.74	17.58
4	01	08	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	92%	155,132,500	37,401,000	90.74	24.11
4	01	08	1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota Persentase realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Kab/kota	92%	327,757,250	105,853,049	91.53%	32.30
4	01	08	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	92%	516,699,750	254,935,730	50%	49.34
4	01	08	1	02	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisa triwulan terhadap capaian kinerja Pembangunan daerah	4 dokumen	94,182,000	34,664,620	50%	36.81

4	01	08	1	02	02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan bulanan/tahunan dan triwulan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 dok/ 1 dok dan 4 dok	269,967,750	6 dokumen/2 dokumen	158,642,110	50%	58.76
4	01	08	1	02	03		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah rumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah	2 dokumen	152,550,000	0	61,629,000	0	40.40

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut diatas bahwa untuk tahun 2023 sebagai penunjang pekerjaan pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang sudah tercantum sesuai dengan Renstra 2021-2026.

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II tahun 2023 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Pelaksanaan belanja modal belum dilaksanakan karena untuk pengadaan ada perubahan terhadap pembelian barang-barang.
2. Terdapatnya beberapa penyesuaian terhadap kegiatan pada bagian-bagian yang harus dilakukan perubahan sehingga mempengaruhi realisasi.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan perubahan Rencana Kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Biro Administrasi Pembangunan sebagai SKPD penunjang urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kabupaten/Kota dalam mendukung Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mendukung program unggulan dalam membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sebagai pengendalian administrasi pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dokumen Renja. Pada tahun 2023, target tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Tujuan/Sasaran Perubahan Renja 2023

TUJUAN	SASARAN	TARGET	
		RENJA 2023	RENJA-P 2023
RPJMD Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	RPJMD Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Fisik : 92 Keu : 92 Pelaporan : 1	Fisik : 92 Keu : 92 Rekomendasi yang ditindaklanjuti : 1
RENSTRA BIRO AP Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan	RENSTRA BIRO AP Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan	Rumusan Kebijakan : 1	

RENJA BIRO AP	RENJA BIRO AP		
<p>4. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>5. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;</p> <p>6. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat ;</p> <p>7. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Biro Administrasi</p>	<p>1. Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD</p> <p>2. Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN</p> <p>3. Rekomendasi yang ditindaklanjuti OPD</p>		

Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam program satu tahun ke depan.			
---	--	--	--

Menperhatikan tabel 3.1 target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2023 diatas menunjukkan terjadi perubahan pada target Renja Perubahan 2023.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan triwulan II. Sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan serta didasarkan juga pada hasil evaluasi serta mengakomodir tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung program unggulan pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu perubahan tahun anggaran 2023 serta perubahan nomenklatur Biro. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Renja Perubahan Tahun 2023 tercantum program/kegiatan/sub

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 3.2

TABEL 3.2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RPKD BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Padang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1,247,803,651	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Padang	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1,114,189,596
4.01.01.1. 01	1 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	88,000,000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	39,484,500

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 dokumen	50,000,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 dokumen	19,437,500
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen penganggaran daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Perubahan RKA SKPD) yang disusun	4 dokumen	23,000,000				Jumlah dokumen penganggaran daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Perubahan RKA SKPD) yang disusun	4 dokumen	9,647,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	7,500,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	2,700,000
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	7,500,000		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	7,700,000
2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib administrasi keuangan	100%	74,420,000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib administrasi keuangan	100%	66,236,000

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 orang	66,420,000				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 orang	63,350,000
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	2 dokumen	8,000,000				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	2 dokumen	2,886,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	36,500,000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	100%	19,410,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	4 unit	20,000,000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 unit	17,760,000
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Kota Padang	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honoraria	3 orang	12,000,000		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Kota Padang	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honoraria	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	3 orang	0

		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	2 dokumen	4,500,000			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	2 dokumen	1,650,000
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20,000,000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80,712,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	2 kali	20,000,000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	2 kali	3,660,000	
		-	-	-	0	0		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Padang	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	28 orang	77,052,000	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	742,653,515	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	716,544,200	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	54,591,800		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	63,355,450	

			-	-	-	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 jenis	70,205,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	48,984,500					50,132,500
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	20,000,000					21,432,000
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Kota Padang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	27 jenis	4,944,000				-	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 dokumen	614,133,215					511,419,250
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	147,860,136	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		80,727,896
	Penyediaan Jasa Surat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	400 surat	5,008,000		Penyediaan Jasa Surat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan	400 surat		4,000,000

	Menyurat						Menyurat		keluar dalam 1 tahun		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayar dan jumlah rekening telp yang dibayarkan	10 mbps 1 rekening	7,698,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayar dan jumlah rekening telp yang dibayarkan	-	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orag	135.154,136		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orang	76,727,896
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	138,370,000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	111,075,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 unit	41,190,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 unit	44,990,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara	3 unit	75,600,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 unit	44,505,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	21,580,000				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	15 unit	21,580,000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD, APBN dan Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Fisik : 92 Keu : 92	1,239,394,000	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD, APBN dan Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Fisik : 92 Keu : 92	922,424,743
	9 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 tahun	722,694,250	9	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Kab/Kota di Sumatera Barat	Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 tahun	494,933,873

	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov Sumbang	92%	239,804,500		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov Sumbang	92%	123,952,408
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD	92%	155,132,500		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD	92%	149,086,250
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	92%	327,757,250		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	92%	221,895,215
10	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 tahun	516,699,750	10	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 tahun	1,159,369,100

	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	OPD Provinsi	Jumlah hasil analisis triwulan terhadap capaian kinerja Pembangunan daerah	4 dokumen	94,182,000		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	OPD Provinsi	Jumlah hasil analisis triwulan terhadap capaian kinerja Pembangunan daerah	4 dokumen	57,205,620
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Jumlah laporan bulanan/triwulan dan triwulan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 dok/ 1 dok dan 4 dok	269,967,750		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab/Kota di Sumatera Barat	Jumlah laporan bulanan/triwulan dan triwulan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 dok/ 1 dok dan 4 dok	265,067,250
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	OPD Provinsi	Jumlah rumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah	2 dokumen	152,550,000		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	OPD Provinsi	Jumlah rumusan kebijakan teknis Pembangunan Daerah	2 dokumen	105,217,000

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut diatas bahwa Anggaran Awal Tahun 2023 sebagai penunjang pekerjaan pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan serta 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. yang sudah tercantum sesuai dengan Renstra 2021-2026.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Biro Administrasi Pembangunan mengalami perubahan struktur terhitung 21 Mei 2021.

Perubahan pagu indikatif awal Biro Administrasi Pembangunan berjumlah Rp. 2.427.661.851,- dengan melaksanakan 2 program 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan setelah dilakukan beberapa kali refocusing maka Biro Administrasi Pembangunan mendapatkan anggaran sebesar Rp 2.036.614.339. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 setelah dilakukan evaluasi kegiatan dan kebutuhan Biro Administrasi Pembangunan selama tahun untuk melaksanakan 2 program 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan seperti terlihat pada tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BERDASARKAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Nama OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp.)
			INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR			
1	2		3	4	5	6	8	9	10
4 0 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1,247,803,651	1,114,189,596	(133,614,055)
4 0 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	88,000,000	39,484,500	(48,515,500)
4 0 01 1 01 0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 dokumen	50,000,000	19,437,500	(30,562,500)

4	0	01	1	01	0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Perubahan RKA SKPD) yang disusun	4 dokumen	Jumlah dokumen penganggaran daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Perubahan RKA SKPD) yang disusun	4 dokumen	23,000,000	9,647,000	(13,353,000)
4	0	01	1	01	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	7,500,000	2,700,000	(4,800,000)
4	0	01	1	01	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	7,500,000	7,700,000	200,000
4	0	01	1	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	Tertib administrasi keuangan	100%	74,420,000	66,236,000	(8,184,000)
4	0	01	1	02	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 orang	66,420,000	63,350,000	(3,070,000)
4	0	01	1	02	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	2 dokumen	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	15 dokumen	8,000,000	2,886,000	(5,114,000)
4	0	01	1	03	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	36,500,000	19,410,000	(17,090,000)
4	0	01	1	03	0	2	Pengamanan BMD SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	4 unit	Jumlah BMD yang diasuransikan	3 dokumen	20,000,000	17,760,000	(2,240,000)
4	0	01	1	03	0	4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honorumnya	3 orang	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honorumnya	3 orang	12,000,000	0	(12,000,000)
4	0	01	1	03	0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	2 dokumen	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah	2 dokumen	4,500,000	1,650,000	(2,850,000)
4	0	01	1	05	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20,000,000	80,712,000	60,712,000

4	0	01	1	05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	8 kali	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	8 kali	20,000,000	3,660,000	(16,340,000)
4	0	01	1	05	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	0	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	28 orang	0	77,052,000	77,052,000
4	0	01	1	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	742,653,515	716,544,200	(26,109,315)
4	0	01	1	06	0	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	54,591,800	63,355,450	8,763,650
4	0	01	1	06	0	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	-	0	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 jenis	0	70,205,000	70,205,000
4	0	01	1	06	0	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	42 jenis	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	42 jenis	48,984,500	50,132,500	1,148,000
4	0	01	1	06	0	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis 10000 Imbr	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis 13136 Imbr	20,000,000	21,432,000	1,432,000
4	0	01	1	06	0	Persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	378 org	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	184 orang	4,944,000	0	(4,944,000)
4	0	01	1	06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	200 dokumen	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 dokumen	614,133,215	511,419,250	(102,713,965)
4	0	01	1	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	147,860,135	80,727,896	(67,132,240)
4	0	01	1	08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	400 surat	Jumlah surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	400 surat	5,008,000	4,000,000	(1,008,000)
4	0	01	1	08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayar dan internet yang Listrik	10 mbps 1 rekening	Jumlah kapasitas tagihan internet yang	10 mbps 1 rekening	7.698.000	0	(7,698,000)

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera barat Tahun 2023 untuk menjaga capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi daerah serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bagian secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Padang, Oktober 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Ir. KUARTINI DETI PUTRI, M.Si
NIP. 19691113 199303 2 002